

**FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan**

Vol. 8, No. 1, 2026

DOI 10.56489/fik.v4i2

P-ISSN: 2620-7834; E-ISSN: 2715-2928

**PARADOKS POLITIK DI BUMI SYARIAT MELACAK DINAMIKA  
KEKALAHAN PARTAI ISLAM DALAM PUSARAN POLITIK ACEH**

**Bustami<sup>1</sup>, Hasyimsyah Nasution<sup>2</sup>, Anang Anas Azhar<sup>3</sup>**

[bustami@uinsu.ac.id](mailto:bustami@uinsu.ac.id), [hasyimsyah@uinsu.ac.id](mailto:hasyimsyah@uinsu.ac.id), [ananganas@uinsu.ac.id](mailto:ananganas@uinsu.ac.id)

**Abstract**

This study analyzes the phenomenon of a political paradox occurring in Aceh, often referred to as the “Land of Sharia,” where Islamic political parties have, in fact, experienced electoral defeats. The primary focus of this research is to explore various social, political, and cultural factors that contribute to unfavorable election outcomes for Islamic parties. Despite Aceh’s strong implementation of Islamic law, general election results indicate that the dominance of Islamic parties is not consistently realized. The methodology employed in this study is a qualitative approach, encompassing case studies, in-depth interviews, and document analysis. The findings reveal that the defeat of Islamic parties in Aceh is not solely due to a rejection of Islamic ideology, but is also influenced by internal party factors, such as ineffective leadership and political strategies that fail to adapt to social changes and public aspirations. In addition, the role of local elites and the dynamics of post-conflict conditions following the peace agreement also contribute to shaping public political preferences. This research provides an important contribution to understanding the relationship between Islamic identity and political behavior in regions characterized by a history of conflict and the implementation of Islamic law.

**Keywords:** Political Paradox, Dynamics, Islamic Parties, Aceh Politics

**A. PENDAHULUAN**

Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memiliki ciri khas yang unik dengan penerapan syariat Islam yang resmi. Hal ini menciptakan sebuah dinamika politik yang menarik untuk dianalisis. Meskipun masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi identitas keislaman dalam kehidupan sehari-hari, partai-partai politik yang berlandaskan ideologi Islam menghadapi berbagai rintangan

---

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

yang signifikan dalam usaha mereka untuk menguasai panggung politik di wilayah ini. Paradoks ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai keagamaan yang kuat dan realitas politik yang kompleks. Masyarakat Aceh, yang dikenal dengan komitmen mereka terhadap syariat, tidak selalu mendukung partai-partai politik yang mengusung agenda Islam. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik masyarakat Aceh dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap dinamika politik di provinsi ini.

Sejarah politik di Aceh sangat erat kaitannya dengan konflik yang berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Republik Indonesia.<sup>4</sup> Ketegangan ini mencapai puncaknya dan berakhir dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Helsinki pada tahun 2005.<sup>5</sup> Kesepakatan ini memberikan otonomi khusus kepada Aceh, yang mencakup hak untuk mendirikan partai politik lokal, sebagai langkah untuk meredakan ketegangan dan memberikan ruang bagi aspirasi politik masyarakat Aceh. Dengan adanya otonomi khusus Aceh mulai mengalami transformasi dalam lanskap politiknya. Salah satu dampak signifikan dari kesepakatan ini adalah munculnya partai-partai politik lokal, di antaranya adalah Partai Aceh.<sup>6</sup>

Partai ini didirikan oleh mantan anggota GAM, yang sebelumnya terlibat dalam perjuangan untuk kemerdekaan Aceh, dan kini beralih ke jalur politik formal untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh dalam kerangka negara kesatuan.<sup>7</sup> Keberadaan Partai Aceh dan partai-partai lokal lainnya mencerminkan perubahan paradigma dalam politik Aceh pasca-konflik. Otonomi yang diberikan melalui Nota Kesepahaman Helsinki tidak hanya memberikan

---

<sup>4</sup> Edward Aspinall, *Islam and Nation, Islam and Nation* (California: Stanford University Press, 2009) <<https://doi.org/10.1515/9780804776271>>.

<sup>5</sup> Bernhard Platzdasch, 'Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia', *Contemporary Southeast Asia*, 31.3 (2009), 511 <<https://doi.org/10.1355/cs31-3i>>.

<sup>6</sup> Cut Meisya Salsabila, 'Dinamika Partai Politik Lokal Aceh', *LPM PERSPEKTIF FEB USK* (Banda Aceh, 2024).

<sup>7</sup> Iwan Gardono Sujatmiko, 'Conflict Transformation and Social Reconciliation: The Case of Aceh, Indonesia', *Asian Social Science*, 8.2 (2012), 104–11 <<https://doi.org/10.5539/ass.v8n2p104>>.

kesempatan bagi masyarakat Aceh untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi juga menjadi sarana untuk mengekspresikan identitas dan aspirasi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konflik telah berakhir, tantangan dalam membangun stabilitas dan kesejahteraan di Aceh masih terus berlanjut.<sup>8</sup>

Penerapan syariat Islam di Aceh merupakan suatu karakteristik unik yang membedakan provinsi ini dari daerah lain di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi syariat tersebut tidak secara otomatis meningkatkan dukungan terhadap partai-partai yang berbasis Islam.<sup>9</sup> Sebaliknya, partai-partai lokal yang memiliki akar dari gerakan kemerdekaan justru lebih mampu meraih kepercayaan masyarakat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa identitas lokal dan sejarah perjuangan masyarakat Aceh memiliki dampak yang lebih signifikan dalam konteks politik dibandingkan dengan ideologi keagamaan. Masyarakat Aceh cenderung lebih menghargai perjuangan yang telah dilakukan oleh partai-partai lokal, yang dianggap lebih relevan dengan pengalaman dan aspirasi mereka.<sup>10</sup>

Hal ini mencerminkan kompleksitas dinamika politik di Aceh yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah dan budaya setempat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun syariat Islam menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Aceh, faktor-faktor lokal seperti sejarah perjuangan dan identitas budaya lebih mendominasi dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks Aceh, politik tidak hanya dipengaruhi oleh aspek keagamaan, tetapi juga oleh nilai-nilai dan pengalaman kolektif yang telah terbangun selama bertahun-tahun.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, Abdul Hadi, and Iping Rahmat Saputra, 'Post-Conflict Reconciliation in Aceh, Indonesia: Perspectives from the Victims', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25.2 (2021), 162–76 <<https://doi.org/10.22146/jsp.66177>>.

<sup>9</sup> Muhammad Siddiq Armia, 'Democracy through Election', *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 2.1 (2018), 323 <<https://doi.org/10.19184/jseahr.v2i1.5333>>.

<sup>10</sup> Suadi Zainal, Kamarulzaman Askandar, and Muhammad Bin Abubakar, 'Why Was "Self-Government" Not Achieved in Aceh? The Challenges of Implementing a Peace Agreement', *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10.3 (2022), 881–904 <<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i3.789>>.

<sup>11</sup> Patrick Barron, Erman Rahmant, and Kharisma Nugroho, 'The Case of Aceh, Indonesia', *The Contested Corners of Asia: Subnational Conflict and International Development Assistance*, 2013.

Terdapat sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap kekalahan partai Islam di Aceh, salah satunya adalah keberadaan partai-partai lokal yang mendominasi. Partai Aceh, misalnya, memiliki dukungan yang solid dari masyarakat berkat hubungan eratnya dengan sejarah perjuangan dan identitas budaya setempat.<sup>12</sup> Kekuatan ini memberikan tantangan yang signifikan bagi partai-partai Islam dalam upaya mereka untuk meraih dukungan pemilih. Partai-partai lokal tidak hanya memiliki basis massa yang kuat, tetapi juga mampu memanfaatkan narasi sejarah yang resonan dengan masyarakat Aceh. Keterikatan emosional masyarakat terhadap perjuangan yang diwakili oleh partai lokal ini menciptakan kesulitan bagi partai-partai Islam untuk menarik perhatian dan dukungan yang sama.

Hal ini menunjukkan bahwa faktor identitas lokal sangat berpengaruh dalam dinamika politik di wilayah tersebut. Dominasi partai lokal di Aceh menjadi salah satu penghalang utama bagi partai-partai Islam untuk berkembang dan bersaing secara efektif. Keterkaitan yang mendalam antara partai lokal dan masyarakat Aceh menciptakan tantangan yang kompleks, di mana partai-partai Islam harus mencari strategi baru untuk dapat beradaptasi dan meraih dukungan di tengah konteks politik yang ada.

Kekecewaan masyarakat terhadap partai-partai Islam dapat muncul dari pandangan bahwa mereka tidak berhasil memberikan solusi yang jelas dan efektif untuk mengatasi isu-isu mendasar, seperti kemiskinan dan pengangguran.<sup>13</sup> Ketidakmampuan ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap keberadaan dan peran partai-partai tersebut dalam menyelesaikan masalah sosial yang krusial. Ketidakpuasan ini sering kali berakar dari harapan yang tinggi terhadap partai-partai Islam untuk menjadi agen perubahan yang signifikan. Namun, ketika harapan tersebut tidak terwujud dalam bentuk tindakan nyata, masyarakat cenderung merasa frustrasi dan kehilangan keyakinan. Hal ini dapat berimplikasi pada berkurangnya dukungan politik yang diberikan kepada partai-

---

<sup>12</sup> Zulkarnaini, 'Pertaruhan Partai Politik Lokal Aceh Pada Pemilu 2024', *Kompas*, 2023.

<sup>13</sup> Ahmad Atang, 'Akademisi Sebut Kekalahan Parpol Islam Karena Banyak Faktor', *ANTARA News*, 2020.

partai tersebut. Sangat penting bagi partai-partai Islam untuk mengevaluasi kembali strategi dan pendekatan mereka dalam menangani isu-isu sosial. Dengan menawarkan solusi yang lebih konkret dan relevan, mereka dapat berupaya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dan meningkatkan dukungan yang selama ini menurun.

Praktik politik transaksional yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam berpotensi merugikan reputasi partai-partai Islam di kalangan pemilih yang memiliki kecenderungan religius.<sup>14</sup> Ketidakcocokan antara tindakan politik dan nilai-nilai agama dapat menciptakan persepsi negatif terhadap integritas partai tersebut. Ketika partai-partai Islam terlibat dalam politik transaksional yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari pemilih yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius. Pemilih yang berpegang pada prinsip-prinsip agama cenderung menilai tindakan politik berdasarkan kesesuaian dengan ajaran yang mereka anut. Penting bagi partai-partai Islam untuk menjaga konsistensi antara praktik politik mereka dan ajaran Islam. Dengan demikian, mereka dapat mempertahankan citra positif di mata pemilih yang religius dan memastikan bahwa nilai-nilai agama tetap menjadi landasan dalam setiap keputusan politik yang diambil.

Menyongsong Pemilu 2024 situasi politik di Aceh menunjukkan tingkat kompleksitas yang semakin meningkat.<sup>15</sup> Partai-partai lokal berupaya untuk menjaga kekuasaan mereka, sedangkan partai-partai berbasis Islam berusaha menarik perhatian pemilih melalui berbagai pendekatan strategis. Namun, mereka harus menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama karena pengaruh kuat dari identitas lokal dan latar belakang sejarah politik yang ada di Aceh. Partai-partai lokal tidak hanya berfokus pada mempertahankan posisi mereka, tetapi juga harus beradaptasi dengan perubahan dinamika pemilih yang semakin

---

<sup>14</sup> Akmal Abzal, 'POLITIK TRANSAKSIONAL, BUKAN AJARAN ISLAM', *Dinas Syariat Islam Aceh*, 2024.

<sup>15</sup> Kharisatul Janah, Siti Fatimah, and Hajar Salamah Salsabila Hariz, 'The Role of Aceh Local Parties in The 2024 General Election in Realizing Democratization', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 6.1 (2023), 33–47 <<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7532>>.

beragam.<sup>16</sup> Sementara itu, partai-partai Islam berusaha untuk membangun koneksi yang lebih dalam dengan masyarakat, dengan memanfaatkan nilai-nilai agama dan budaya lokal. Hal ini menciptakan persaingan yang ketat di antara berbagai kelompok politik yang ada.<sup>17</sup> Dengan latar belakang tersebut penting untuk memahami bagaimana identitas dan sejarah politik Aceh mempengaruhi perilaku pemilih. Kekuatan tradisi dan nilai-nilai lokal sering kali menjadi faktor penentu dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang efektif harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang ada agar dapat meraih dukungan yang maksimal dari pemilih.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang kompleks, apa alasan di daerah yang menerapkan syariat Islam, partai-partai Islam tidak dapat mencapai kemenangan yang berarti? Pertanyaan ini mengarah pada analisis yang lebih dalam mengenai dinamika politik dan sosial di wilayah tersebut. Mungkin terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi hasil pemilihan, seperti tingkat partisipasi masyarakat, strategi kampanye, atau bahkan persepsi publik terhadap partai-partai tersebut. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan konteks sejarah dan budaya yang membentuk sikap masyarakat terhadap politik Islam. Dengan memahami elemen-elemen ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh partai-partai Islam dalam meraih dukungan yang substansial di wilayah yang menerapkan syariat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mengapa partai-partai politik berideologi Islam tidak dapat menguasai dominasi politik meskipun adanya dukungan kuat terhadap syariat Islam. Dengan menganalisis konteks sosial, budaya, dan politik yang ada, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara identitas keislaman dan praktik politik di Aceh. Hal ini akan

---

<sup>16</sup> Dauda A. Busari, 'Transactional Politics: The Manifestations of the Challenges of "Infrastructure of the Stomach" and "Infrastructure for the Stomach" in Nigeria', *Journal of Contemporary African Studies*, 38.3 (2020), 366–80 <<https://doi.org/10.1080/02589001.2020.1798364>>.

<sup>17</sup> Elidar Sari and others, 'Dinamika Politik Partai Lokal Di Aceh Menjelang Pemilu 2024 : Analisis Undang-Undang Pemilu Dan Partai Lokal Political Dynamics of Local Parties in Aceh Ahead of the 2024 Election : Analysis of Election Laws and Local Parties', *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.*, 12.1 (2024), 159–76.

memberikan kontribusi penting bagi studi tentang politik Islam di Indonesia secara keseluruhan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena kekalahan partai Islam di Aceh.<sup>18</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hasil tersebut. Desain penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis,<sup>19</sup> yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis dinamika politik yang berperan dalam kekalahan partai Islam di wilayah Aceh. Dengan cara ini penelitian ini tidak hanya mencatat fakta-fakta yang ada, tetapi juga berusaha untuk menginterpretasikan makna di balik fenomena tersebut.<sup>20</sup> Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi data dengan memanfaatkan berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Selain itu uji kredibilitas dilakukan dengan cara mengonfirmasi temuan yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan pakar di bidang terkait, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Politik Aceh**

Sejarah politik Aceh dapat ditelusuri kembali ke era Kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri pada awal abad ke-16. Kesultanan ini memiliki peranan yang signifikan dalam perdagangan internasional serta dalam penyebaran agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Aceh dikenal sebagai pusat keislaman yang

---

<sup>18</sup> Harry T. Reis and Charles M. Judd, *HANDBOOK OF RESEARCH METHODS IN SOCIAL AND PERSONALITY PSYCHOLOGY*, *Journal GEEJ* (London and New York: Cambridge University Press, 2014), VII.

<sup>19</sup> John W. Creswell, *Research Design* (Los Angeles: Sage, 2009) <<https://doi.org/10.4324/9781003411505-2>>.

<sup>20</sup> Johnny Saldana Matthew B. Milees, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook, Sustainability (Switzerland)* (London and New York: Sage Publications, 2014), XI.

<sup>21</sup> PATRICIA LEAVY, *Research Design Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches, Sustainability (Switzerland)* (New York and London: The Guilford Press, 2017), XI.

kuat, yang menjadi fondasi bagi pembentukan identitas politik masyarakatnya. Selama masa penjajahan Belanda, Aceh menjadi salah satu daerah yang paling sulit untuk dikuasai.

Perang Aceh yang berlangsung dari tahun 1873 hingga 1904 mencerminkan perlawanan yang gigih dari masyarakat Aceh terhadap kekuasaan kolonial. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, Aceh tetap mempertahankan identitas politik yang kuat, meskipun ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat memicu lahirnya gerakan separatis, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976. Konflik yang berkepanjangan ini baru berakhir dengan tercapainya perjanjian damai pada tahun 2005. Setelah perjanjian damai, Aceh diberikan status otonomi khusus yang memungkinkan penerapan syariat Islam secara resmi. Munculnya partai-partai lokal di Aceh diharapkan dapat lebih baik mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan demikian, Aceh berupaya untuk memperkuat identitas politiknya dalam kerangka otonomi yang lebih luas.<sup>22</sup>

Meskipun Aceh dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, partai-partai Islam tidak selalu mampu mendapatkan dukungan mayoritas dari masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang menjelaskan fenomena ini, salah satunya adalah fragmentasi di kalangan partai-partai Islam itu sendiri. Dengan banyaknya partai yang mengklaim mewakili nilai-nilai Islam, suara pemilih menjadi terpecah, yang pada gilirannya mengurangi kekuatan partai-partai Islam di tingkat lokal.

Kehadiran partai-partai lokal seperti Partai Aceh (PA) setelah perjanjian damai juga berkontribusi pada perubahan dinamika politik di Aceh. PA, yang berasal dari mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), berhasil meraih dukungan yang signifikan karena dianggap lebih mampu mewakili aspirasi masyarakat Aceh dibandingkan dengan partai-partai Islam yang lebih berorientasi pada skala nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap partai lokal dapat menggeser dominasi partai-partai Islam.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Aspinall.

<sup>23</sup> Platzdasch.

Pemilih di Aceh semakin menuntut kinerja pemerintahan yang lebih baik, dengan isu-isu kesejahteraan seperti pengangguran, pendidikan, dan infrastruktur menjadi prioritas utama. Partai-partai yang tidak mampu memberikan solusi nyata terhadap tantangan-tantangan ini cenderung kehilangan dukungan, meskipun mereka memiliki basis ideologi Islam. Kompleksitas identitas politik di Aceh juga mencerminkan bahwa pemilih lebih pragmatis, memilih partai yang dapat memberikan manfaat konkret, terlepas dari latar belakang ideologis yang diusung.<sup>24</sup>

Fenomena ini memberikan beberapa pelajaran berharga yang dapat dipetik oleh partai-partai Islam. Salah satu pelajaran utama adalah perlunya konsolidasi di antara partai-partai tersebut. Dengan mengatasi fragmentasi yang ada, partai-partai Islam dapat membangun koalisi yang lebih solid, yang pada gilirannya akan memperkuat dukungan dari basis pemilih dan mencegah terjadinya perpecahan suara. Partai-partai Islam seharusnya lebih fokus pada kinerja dan program-program yang konkret. Isu-isu kesejahteraan yang langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama.<sup>25</sup>

Program-program yang dapat secara nyata meningkatkan kualitas hidup masyarakat akan lebih dihargai oleh pemilih dibandingkan dengan sekadar retorika yang berbasis pada agama. Peningkatan partisipasi politik juga menjadi hal yang krusial bagi partai-partai Islam. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk generasi muda dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, partai-partai ini dapat memperkuat legitimasi dan daya saing mereka di panggung politik. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang dinamika lokal, termasuk aspek budaya dan sejarah yang khas di Aceh, sangat penting untuk merumuskan strategi yang tepat dan sensitif terhadap konteks setempat.

---

<sup>24</sup> Michelle Ann Miller, *REBELLION AND REFORM IN INDONESIA JAKARTA'S SECURITY AND AUTONOMY POLICIES IN ACEH, Rebellion and Reform in Indonesia* (London and New York: Routledge, 2008) <<https://doi.org/10.4324/9780203888193>>.

<sup>25</sup> R. MICHAEL FEENER, *Shari'a and Social Engineering The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia, Etica e Politica* (London and New York: OXFORD ISLAMIC LEGAL STUDIES, 2013), xv <<https://doi.org/10.1093/acprof>>.

## 2. Dinamika Sosial dan Ekonomi di Aceh

Sejak ditandatanganinya Perjanjian Damai Helsinki pada tahun 2005, Aceh memasuki era baru dalam aspek sosial dan ekonomi. Akhir dari konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia menciptakan kesempatan untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi di berbagai bidang. Dalam proses ini, pemerintah bersama dengan lembaga internasional berkontribusi secara aktif dalam membangun kembali infrastruktur serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berbagai tantangan masih harus dihadapi. Isu kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi masalah yang signifikan di wilayah tersebut. Walaupun terdapat upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat mencolok.<sup>26</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Penerapan syariat Islam di Aceh turut mempengaruhi dinamika sosial masyarakat. Terdapat perdebatan yang terus berlangsung mengenai cara interpretasi dan implementasi syariat dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi ini mencerminkan keragaman pandangan di kalangan masyarakat Aceh, yang menunjukkan bahwa proses pembangunan tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga aspek sosial dan budaya yang kompleks.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai kecenderungan politik masyarakat Aceh. Dalam konteks ini, terdapat beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi perubahan preferensi politik di daerah tersebut. Pertama, kekecewaan terhadap partai-partai Islam lokal menjadi salah satu penyebab utama. Setelah berakhirnya konflik, sejumlah mantan anggota GAM mendirikan partai politik dengan basis Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat

---

<sup>26</sup> FEENER, xv.

mulai merasakan bahwa partai-partai tersebut tidak mampu memenuhi ekspektasi mereka dalam hal kesejahteraan dan pembangunan.<sup>27</sup>

Ada anggapan bahwa syariat Islam telah dipolitisasi dan digunakan oleh elit politik sebagai alat legitimasi, yang pada gilirannya menciptakan sikap pragmatis di kalangan masyarakat. Selanjutnya, perubahan preferensi di kalangan pemilih muda juga berkontribusi pada dinamika ini. Generasi muda Aceh, yang lebih terpapar pada informasi global dan memiliki akses pendidikan yang lebih baik, cenderung memiliki pandangan yang lebih moderat. Mereka lebih memilih untuk mendukung partai yang menawarkan program-program konkret terkait ekonomi dan pendidikan, daripada yang hanya berfokus pada agenda keagamaan. Di sisi lain, kondisi sosial-ekonomi yang sulit, seperti tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan solusi praktis yang ditawarkan oleh partai-partai politik.<sup>28</sup>

Kekalahan partai Islam di Aceh, meskipun wilayah ini menerapkan syariat Islam, menunjukkan adanya kompleksitas dalam dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi pilihan pemilih. Kekecewaan terhadap kinerja partai Islam yang ada, pergeseran preferensi di kalangan generasi muda, tantangan dalam bidang ekonomi, serta pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam, semuanya berperan dalam mengubah peta politik di Aceh. Untuk menganalisis fenomena ini secara komprehensif, penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam yang mencakup berbagai faktor yang saling terkait.<sup>29</sup>

Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana kinerja partai politik lokal dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat, serta bagaimana generasi muda yang lebih kritis dan teredukasi dapat mengubah arah politik di daerah tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, kita dapat memperoleh

---

<sup>27</sup> Humas DSI, 'Berita Islam Dan Politik Tidak Dapat Dipisahkan', *Dinas Syariat Islam Aceh*, 2023.

<sup>28</sup> Siti Ikramatoun, 'Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan Dan Implementasi Syariat Islam Pasca Tsunami', *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11.1 (2017), 1-20 <<https://doi.org/10.14421/jsr.v11i1.1261>>.

<sup>29</sup> DSI.

wawasan yang lebih jelas mengenai dinamika politik di Aceh. Penelitian yang lebih lanjut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana syariat Islam dan faktor-faktor sosial-ekonomi berinteraksi dalam membentuk preferensi pemilih di wilayah ini.

### **3. Strategi Partai Islam di Aceh**

Strategi identitas keagamaan yang diterapkan oleh partai-partai Islam di Aceh sering kali berfokus pada penguatan citra keislaman untuk menarik perhatian pemilih.<sup>30</sup> Meskipun Aceh dikenal sebagai daerah yang sangat religius, pendekatan ini tidak selalu menghasilkan dukungan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa identitas agama saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan dalam konteks politik yang kompleks dan dinamis. Salah satu pendekatan yang diambil dalam kampanye politik adalah penekanan pada penerapan syariat Islam secara ketat. Meskipun hal ini menjadi salah satu fokus utama, dalam praktiknya, banyak yang melihat penerapan syariat sebagai sekadar alat retorika politik yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Akibatnya hal ini menimbulkan rasa apatis di kalangan pemilih yang merasa tidak ada perubahan nyata dari kebijakan yang diusung. Dapat disimpulkan bahwa meskipun identitas agama dan penerapan syariat menjadi bagian penting dalam strategi kampanye partai Islam di Aceh, keduanya tidak selalu efektif dalam menarik dukungan pemilih. Penting bagi partai-partai tersebut untuk memahami dinamika politik lokal dan mengembangkan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya mengandalkan identitas keagamaan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Beberapa partai Islam berusaha menjalin kerjasama dengan partai-partai lokal yang memiliki dukungan massa yang signifikan.<sup>31</sup> Namun, kerjasama ini sering kali menemui kendala dalam pelaksanaannya, disebabkan oleh perbedaan

---

<sup>30</sup> SARAH MOSER, ' Indonesia. Islam and the State in Indonesia . By BAHTIAR EFFENDY. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003. Pp. Xii, 265. Notes, Bibliography, Index. ', *Journal of Southeast Asian Studies*, 37.1 (2006), 165–67 <<https://doi.org/10.1017/s0022463405520472>>.

<sup>31</sup> Armia.

dalam kepentingan dan tujuan politik masing-masing, serta adanya persaingan yang cukup ketat di antara mereka. Dalam rangka menarik perhatian pemilih yang lebih muda, partai-partai Islam mulai memanfaatkan platform media sosial sebagai alat kampanye.

Meskipun pendekatan ini menawarkan kesempatan baru untuk berinteraksi dengan pemilih, efektivitasnya masih diragukan, terutama karena kurangnya konten yang dapat menarik minat dan relevansi bagi generasi muda. Untuk meningkatkan dampak dari strategi ini, partai-partai Islam perlu mengembangkan konten yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan serta preferensi pemilih muda. Hal ini penting agar mereka dapat bersaing secara efektif dalam arena politik yang semakin dipengaruhi oleh teknologi dan media digital.

#### **4. Dinamika Kekalahan Partai Islam di Aceh**

Persepsi masyarakat terhadap partai Islam di Aceh menunjukkan adanya harapan yang tinggi agar partai tersebut dapat memimpin dengan prinsip-prinsip keislaman yang kokoh.<sup>32</sup> Namun, ketidakmampuan partai dalam memenuhi ekspektasi tersebut, terutama terkait dengan aspek transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kesejahteraan, berujung pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat. Dalam konteks persaingan politik, partai nasional yang memiliki dukungan kuat di Aceh mampu menghadirkan program-program yang lebih menarik dan realistis bagi masyarakat.

Mereka sering kali menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam strategi politik dan lebih mampu beradaptasi dengan dinamika lokal, berbeda dengan partai Islam yang sering kali terjebak dalam perdebatan ideologis yang kaku.<sup>33</sup> Akibat dari situasi ini masyarakat Aceh cenderung beralih kepada partai nasional yang dianggap lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mempertahankan relevansi, partai Islam perlu

---

<sup>32</sup> Ikramatoun.

<sup>33</sup> Mohammad Hasan Ansori and Ms Rostineu, 'Building Democracy in Post-Conflict Aceh: Dynamics and Challenges', 129.Icsps 2017 (2018), 38–42 <<https://doi.org/10.2991/icsps-17.2018.8>>.

melakukan evaluasi mendalam terhadap pendekatan dan program yang ditawarkan, agar dapat lebih sesuai dengan harapan publik.

Fragmentasi internal dalam partai-partai Islam di Aceh kerap kali menjadi penyebab terjadinya konflik dan perpecahan di antara mereka. Kondisi ini berimplikasi negatif terhadap posisi partai di mata pemilih, serta menciptakan persepsi bahwa partai tersebut tidak stabil dan kurang mampu dalam menjalankan fungsinya. Tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat sering kali menjadi perhatian utama bagi para pemilih.

Partai-partai Islam yang lebih menekankan pada isu-isu syariat sering kali dianggap tidak peka terhadap kebutuhan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja, akses pendidikan yang berkualitas, dan penyediaan layanan kesehatan yang memadai.<sup>34</sup> Penting bagi partai-partai Islam di Aceh untuk menyeimbangkan fokus mereka antara isu-isu syariat dan kebutuhan praktis masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan relevansi dan daya tarik mereka di kalangan pemilih, serta memperkuat posisi mereka dalam arena politik yang semakin kompetitif.

Meskipun Aceh dikenal dengan penerapan syariat Islam yang khas, partai-partai Islam di wilayah ini menghadapi sejumlah tantangan dalam menarik dukungan pemilih.<sup>35</sup> Pendekatan yang menekankan identitas agama dan syariat Islam tampaknya belum memadai untuk mengatasi kerumitan dinamika politik yang ada di tingkat lokal. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pentingnya partai-partai Islam untuk menyesuaikan diri dengan konteks politik dan sosial yang lebih luas. Mereka harus meningkatkan kapasitas organisasi, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, serta merumuskan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian partai-partai ini dapat lebih relevan dan responsif terhadap aspirasi publik. Partai-partai Islam perlu bersaing secara konstruktif

---

<sup>34</sup> Bama Andika Putra, Darwis, and Burhanuddin, 'ASEAN Political-Security Community: Challenges of Establishing Regional Security in the Southeast Asia', *Journal of International Studies*, 12.1 (2019), 33–49 <<https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-1/2>>.

<sup>35</sup> Azyumardi Azra & Arskal Salim, *Shari'a and Politics in Modern Indonesia* (Singapore: Insitute of Southeast Asian Studies, 2003).

dengan partai-partai lain, baik di tingkat lokal maupun nasional. Mereka harus mampu menawarkan solusi yang konkret dan efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh, sehingga dapat meningkatkan daya tarik dan kepercayaan pemilih terhadap mereka.

#### **D. KESIMPULAN**

Paradoks politik yang terjadi di Aceh mengindikasikan bahwa meskipun identitas keislaman sangat dominan, preferensi politik masyarakat di daerah ini jauh lebih rumit dan dipengaruhi oleh beragam faktor. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh tidak hanya mempertimbangkan aspek keagamaan dalam menentukan pilihan politik mereka, melainkan juga faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang turut berperan. Untuk dapat meraih kembali dukungan pemilih di Aceh, partai-partai Islam perlu mengembangkan strategi yang lebih menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif akan memungkinkan partai-partai tersebut untuk lebih memahami dinamika yang ada dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh saat ini. Penting bagi partai Islam untuk tidak hanya mengandalkan identitas keagamaan sebagai alat untuk menarik pemilih, tetapi juga untuk mengintegrasikan isu-isu lokal yang relevan dalam platform politik mereka. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas preferensi politik masyarakat, partai-partai ini dapat menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dan menarik bagi pemilih di Aceh.

Paradoks politik yang terjadi di Aceh mengindikasikan bahwa identitas keislaman yang dimiliki oleh masyarakat tidak selalu sejalan dengan dukungan terhadap partai-partai yang berbasis Islam. Berbagai faktor, termasuk sejarah setempat, identitas budaya, serta kinerja partai dalam menangani isu-isu yang relevan, memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pilihan politik masyarakat. Penting bagi partai-partai Islam untuk memahami dan menyesuaikan pendekatan mereka dengan dinamika yang ada di tingkat lokal. Hal ini menjadi krusial agar mereka dapat meraih dukungan yang lebih luas dan efektif di Aceh. Kesuksesan politik di Aceh tidak hanya bergantung pada identitas keagamaan, tetapi juga pada

kemampuan partai untuk beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya yang unik di wilayah tersebut. Oleh karena itu, strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal akan sangat menentukan dalam meraih kepercayaan publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abzal, Akmal, 'POLITIK TRANSAKSIONAL, BUKAN AJARAN ISLAM', *Dinas Syariat Islam Aceh*, 2024
- Ansori, Mohammad Hasan, and Ms Rostineu, 'Building Democracy in Post-Conflict Aceh: Dynamics and Challenges', *129.Icsps 2017 (2018)*, 38–42 <<https://doi.org/10.2991/icsps-17.2018.8>>
- Armia, Muhammad Siddiq, 'Democracy through Election', *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 2.1 (2018), 323 <<https://doi.org/10.19184/jseahr.v2i1.5333>>
- Aspinall, Edward, *Islam and Nation, Islam and Nation* (California: Stanford University Press, 2009) <<https://doi.org/10.1515/9780804776271>>
- Atang, Ahmad, 'Akademisi Sebut Kekalahan Parpol Islam Karena Banyak Faktor', *ANTARA News*, 2020
- Barron, Patrick, Erman Rahmant, and Kharisma Nugroho, 'The Case of Aceh, Indonesia', *The Contested Corners of Asia: Subnational Conflict and International Development Assistance*, 2013
- Busari, Dauda A., 'Transactional Politics: The Manifestations of the Challenges of "Infrastructure of the Stomach" and "Infrastructure for the Stomach" in Nigeria', *Journal of Contemporary African Studies*, 38.3 (2020), 366–80 <<https://doi.org/10.1080/02589001.2020.1798364>>
- Creswell, John W., *Research Design* (Los Angeles: Sage, 2009) <<https://doi.org/10.4324/9781003411505-2>>
- DSI, Humas, 'Berita Islam Dan Politik Tidak Dapat Dipisahkan', *Dinas Syariat Islam Aceh*, 2023
- FEENER, R. MICHAEL, *Shari a and Social Engineering The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia, Etica e Politica* (London and

- New York: OXFORD ISLAMIC LEGAL STUDIES, 2013), xv  
<<https://doi.org/10.1093/acprof>>
- Ikramatoun, Siti, 'Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan Dan Implementasi Syariat Islam Pasca Tsunami', *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11.1 (2017), 1–20  
<<https://doi.org/10.14421/jsr.v11i1.1261>>
- Janah, Kharisatul, Siti Fatimah, and Hajar Salamah Salsabila Hariz, 'The Role of Aceh Local Parties in The 2024 General Election in Realizing Democratization', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 6.1 (2023), 33–47 <<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7532>>
- Judd, Harry T. Reis and Charles M., *HANDBOOK OF RESEARCH METHODS IN SOCIAL AND PERSONALITY PSYCHOLOGY*, *Journal GEEJ* (London and New York: Cambridge University Press, 2014), vii
- LEAVY, PATRICIA, *Research Design Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches, Sustainability (Switzerland)* (New York and London: The Guilford Press, 2017), xi
- Manan, Abdul, Abdul Hadi, and Iping Rahmat Saputra, 'Post-Conflict Reconciliation in Aceh, Indonesia: Perspectives from the Victims', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25.2 (2021), 162–76  
<<https://doi.org/10.22146/jsp.66177>>
- Matthew B. Milees, A. Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook, Sustainability (Switzerland)* (London and New York: Sage Publications, 2014), xi
- Miller, Michelle Ann, *REBELLION AND REFORM IN INDONESIA JAKARTA'S SECURITY AND AUTONOMY POLICIES IN ACEH*, *Rebellion and Reform in Indonesia* (London and New York: Routledge, 2008)  
<<https://doi.org/10.4324/9780203888193>>
- MOSER, SARAH, 'Indonesia. Islam and the State in Indonesia . By BAHTIAR EFFENDY. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003. Pp. Xii, 265. Notes, Bibliography, Index. ', *Journal of Southeast Asian Studies*, 37.1

- (2006), 165–67 <<https://doi.org/10.1017/s0022463405520472>>
- Platzdasch, Bernhard, ‘Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia’, *Contemporary Southeast Asia*, 31.3 (2009), 511 <<https://doi.org/10.1355/cs31-3i>>
- Putra, Bama Andika, Darwis, and Burhanuddin, ‘ASEAN Political-Security Community: Challenges of Establishing Regional Security in the Southeast Asia’, *Journal of International Studies*, 12.1 (2019), 33–49 <<https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-1/2>>
- Salim, Azyumardi Azra & Arskal, *Shari’a and Politics in Modern Indonesia* (Singapore: Insitute of Southeast Asian Studies, 2003)
- Salsabila, Cut Meisya, ‘Dinamika Partai Politik Lokal Aceh’, *LPM PERSPEKTIF FEB USK* (Banda Aceh, 2024)
- Sari, Elidar, Arif Rahman, Faisal, and Muksalmina, ‘Dinamika Politik Partai Lokal Di Aceh Menjelang Pemilu 2024 : Analisis Undang-Undang Pemilu Dan Partai Lokal Political Dynamics of Local Parties in Aceh Ahead of the 2024 Election : Analysis of Election Laws and Local Parties’, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.*, 12.1 (2024), 159–76
- Sujatmiko, Iwan Gardono, ‘Conflict Transformation and Social Reconciliation: The Case of Aceh, Indonesia’, *Asian Social Science*, 8.2 (2012), 104–11 <<https://doi.org/10.5539/ass.v8n2p104>>
- Zainal, Suadi, Kamarulzaman Askandar, and Muhammad Bin Abubakar, ‘Why Was “Self-Government” Not Achieved in Aceh? The Challenges of Implementing a Peace Agreement’, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10.3 (2022), 881–904 <<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i3.789>>
- Zulkarnaini, ‘Pertaruhan Partai Politik Lokal Aceh Pada Pemilu 2024’, *Kompas*, 2023